



**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
HASIL SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
TRI WULAN IV TAHUN 2024**



PENGADILAN NEGERI CIAMIS KELAS 1B

Jl. Jenderal Sudirman No. 116, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis 46211, Jawa Barat

☎ (0265) 771021, Fax. (0265) 772028

@ www.pn-ciamis.go.id

✉ info@pn-ciamis.go.id, pnciamis@yahoo.co.id

1. Dasar Pelaksanaan Pengawasan Bidang Kepaniteraan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KM A/SK/11/2 012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
6. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi pada Mahkamah Agung RI (Buku II);
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/I/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
9. SK Dirjen Badilum Nomor 1230/DJU/SK/HM.02.3/4/2021 Tentang Pemberlakuan Aplikasi Layanan Elektronik Terpadu (LENERA), Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) dan Aplikasi Pengawasan Elektronik Eksekusi (PERKUSI) di Lingkungan Peradilan Umum.

2. Ruang Lingkup

Monitoring dan Evaluasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hasil survey persepsi anti korupsi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik pada satuan kerja Pengadilan Negeri Ciamis.

3. Monitoring Implementasi SOP Kepaniteraan Hukum

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan diperoleh nilai hasil Survei Persepsi Anti Korupsi di Pengadilan Negeri Ciamis Kelas 1B Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 99,08% atau 3,96 (Skala 4) dan berada pada kategori A (Sangat Baik) atau masuk pada kategori bersih dari korupsi.

Adapun kesimpulan dan nilai pada masing-masing ruang lingkup sebagai berikut

- a. Bahwa mayoritas responden menyatakan pelayanan oleh petugas di Pengadilan Negeri Ciamis Kelas 1B sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku (96,93%). Dari hasil analisis diperoleh rata-rata kriteria skor sejumlah 3,96 poin dengan kategori A "Sangat Baik".
- b. Bahwa Seluruh responden menyatakan bahwa Petugas di Pengadilan Negeri Ciamis Kelas 1B melayani tanpa meminta imbalan sebesar 100%. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata kriteria skor sejumlah 4,00 poin dengan kategori A "Sangat Baik".

- c. Bahwa mayoritas responden menyatakan tidak ada dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara (98,98%). Dari hasil analisis diperoleh rata-rata kriteria skor sejumlah 3,99 poin dengan kategori A “Sangat Baik”.
- d. Bahwa mayoritas responden menyatakan adanya Transparansi Biaya di Pengadilan Negeri Ciamis Kelas 1B (86,73%). Dari hasil analisis diperoleh rata-rata kriteria skor sejumlah 3,83 poin dengan kategori A “Sangat Baik”.
- e. Bahwa seluruh responden menyatakan bahwa Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan Negeri Ciamis Kelas 1B (95,92%). Dari hasil analisis diperoleh rata-rata kriteria skor sejumlah 3,95 poin dengan kategori A “Sangat Baik”.
- f. Bahwa Mayoritas responden menyatakan tidak ada pemberian Hadiah di Pengadilan Negeri Ciamis Kelas 1B (94,90%). Dari hasil analisis diperoleh rata-rata kriteria skor sejumlah 3,94 poin dengan kategori A “Sangat Baik”.
- g. Bahwa mayoritas responden menyatakan adanya Transparansi Pembayaran di Pengadilan Negeri Ciamis Kelas 1B dengan selalu menerima bukti transaksi keuangan atau pembayaran yang sah (95,92%). Dari hasil analisis diperoleh rata-rata kriteria skor sejumlah 3,95 poin dengan kategori A “Sangat Baik”.
- h. Bahwa mayoritas responden menyatakan tidak ada praktek Percaloan di Pengadilan Negeri Ciamis Kelas 1B (97,95%). Dari hasil analisis diperoleh rata-rata kriteria skor sejumlah 3,98 poin dengan kategori A “Sangat Baik”.
- i. Bahwa seluruh responden menyatakan tidak ada Perbuatan Curang di Pengadilan Negeri Ciamis Kelas 1B (98,98%). Dari hasil analisis diperoleh rata-rata kriteria skor sejumlah 3,99 poin dengan kategori A “Sangat Baik”.
- j. Bahwa seluruh responden menyatakan tidak ada Transaksi Rahasia di Pengadilan Negeri Ciamis Kelas 1B (100%). Dari hasil analisis diperoleh rata-rata kriteria skor sejumlah 4,00 poin dengan kategori A “Sangat Baik”.

4. Evaluasi Implementasi 3 Kriteria Nilai Terendah

Berdasarkan 10 kriteria penilaian Survei Persepsi Anti Korupsi, diketahui terdapat 3 kriteria dengan nilai terendah, antara lain sebagai berikut:

- a. Kriteria **Transparansi Biaya** di Pengadilan Negeri Ciamis Kelas 1B dengan perolehan rata-rata kriteria skor sejumlah 3,83 poin dengan kategori A “Sangat Baik”.
- b. Kriteria **Hadiah** di Pengadilan Negeri Ciamis Kelas 1B dengan perolehan rata-rata kriteria skor sejumlah 3,94 poin dengan kategori A “Sangat Baik”
- c. Kriteria **Biaya Tambahan** di Pengadilan Negeri Ciamis Kelas 1B dengan perolehan rata-rata kriteria skor sejumlah 3,95 poin dengan kategori A “Sangat Baik”.

Berdasarkan penilaian tersebut, disampaikan evaluasi sebagai berikut:

a. **Transparansi Biaya**

Telah tersedia biaya/tarif pada papan pengumuman dan tercantum pada standar pelayanan yang dapat dilihat melalui website Pengadilan Negeri Ciamis Kelas 1B petugas PTSP pun akan memberitahukan biaya biaya resmi terkait pelayanan yang ada biayanya ;

b. **Hadiah**

Pengadilan Negeri Ciamis selalu warning untuk tidak menerima hadiah berupa apapun yang diberikan penerima layanan dalam pengurusan layanan di Pengadilan dan Pimpinan selalu melakukan Pembinaan setiap bulan terhadap ASN Pengadilan Negeri Ciamis.

c. **Biaya Tambahan**

Telah tersedia akses informasi mengenai tarif/biaya pada website Pengadilan Negeri Ciamis dan Petugas PTSP telah memberikan kwitansi / Tanda Terima pada setiap layanan yang dikenakan biaya PNBPN resmi sesuai ketentuan yang berlaku

4. Penutup

Pimpinan secara disiplin melakukan monitoring dan evaluasi hasil Survey Persepsi Anti Korupsi berdasarkan SK Dirjen Badilum No.1230/DJU/SK/HM.02.3/4/2021 berdasarkan SK Dirjen Badilum Nomor 1230/DJU/SK/HM.02.3/4/2021 Tentang Pemberlakuan Aplikasi Layanan Elektronik Terpadu (LENTERA), Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) dan Aplikasi Pengawasan Elektronik Eksekusi (PERKUSI) di Lingkungan Peradilan Umum.

Demikian Laporan Monitoring dan Evaluasi hasil Survey Persepsi Anti Korupsi Triwulan IV 2024 pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Ciamis Kelas 1B.

Ciamis, 8 Januari 2025
Ketua Tim Survei

Pengadilan Negeri Ciamis



ARPISOL, SH.
NIP. 198006102007041001